

**IMPLIKASI NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES  
PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK  
MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-  
syarat untuk mendapat gelar Sarjana S1 (S.H) dari fakultas Syariah  
dan Hukum**

**OLEH :**

**SULHANUDDIN LUBIS**

**21.15.3.046**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : “IMPLIKASI NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan)”. Nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kejelasan status dan kedudukan anak tersebut masih dipertanyakan. Di dalam pengurusan akta lahir salah satu syaratnya menurut Perpres No 25 Tahun 2008 adalah buku nikah bagi yang tidak memiliki buku nikah pencatatan tetap dilaksanakan dan status anak sebagai anak ibu, sementara di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 bagi yang tidak memiliki buku nikah harus melampirkan SPTJM sebagai penggantinya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan : Bagaimana kedudukan perkawinan di bawah tangan perspektif UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Bagaimana proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan di bawah tangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan? Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum berupa data sekunder dengan data primer. Teknik yang dipakai dalam memperoleh data-data yaitu dengan teknik *field research* (penelitian lapangan), sebagai sumber yaitu, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta observasi dan penelitian kepustakaan, sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca Undang-undang, buku-buku. Hasil penelitian ini, adalah akta nikah harus ada untuk menjamin hak-hak seorang istri dan anak yang dilahirkannya. Adapun pengganti akta nikah adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), dan juga PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1). Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang membolehkan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah. Sehingga secara hukum anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua hamba-Nya. Dengan rahmat-Nya, Dia memberikan kemudahan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT, serta bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana ini, dengan judul: **IMPLIKASI NIKAH DI BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan)**, untuk memenuhi dan melengkapi beban studi dalam mencapai gelar Sarjana pada jurusan Akhwal As-Syakhsyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasinya. Penulis dalam hal ini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah : Bapak Dr. Zulham M.Hum

3. Kepada Ketua Jurusan Al-Akhwāl As-Syakhsyah Fakultas Syariah : Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Sekretaris Jurusan Bapak Irwan, M.Ag.
4. Kepada Bapak Dr. Mhd Yadi Harahap, S.HI,MH selaku pembimbing satu dan Bapak Ali Akbar, S.Ag, MA selaku pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan ketelitian dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini seperti yang diharapkan.
5. Kepada responden yang telah memberikan penulis data-data yang diperlukan. Yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, KUA Medan Petisah, KUA Medan Sunggal, dan KUA Medan Helvetia.
6. Terima kasih penulis sebesar-besarnya kepada dosen-dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk bekal hidup di dunia dan akhirat.
7. Kepada adek-adek ku tersayang Muhammad Rahmat Hadi Lubis dan Ahmad Husein Lubis yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Tak terlupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman seperjuangan teman suka dan duka : Akhwāl As-Syakhsyah B, terkhusus Ricky Irbansyah dan Dyas Ulfi Syahfira. terkhusus kepada sahabat saya Shahifah Nur Luis S.E, Afifaturoddiyah. Dan mereka yang tidak bisa penulis cantumkan namanya dalam tulisan ini.
9. Teristimewa dan ungkapan terima kasih setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada yang mulia Ayahanda tercinta Lokot Lubis Bin

parluhutan Lubis dan Ibunda Juliana Nasution Binti Arsas, yang telah membuka mata penulis dengan mendidik dan mengajarkan hakikat kehidupan ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam susunan kata-kata ataupun lainnya, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para dosen pembimbing nantinya sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon petunjuk dan berserah diri semoga karya tulis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

*Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*

Medan, 18 Oktober 2019  
Penulis

**SULHANUDDIN LUBIS**  
NIM 21 15 3 046

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Kerangka Pemikiran .....	17
I. Hipotesis .....	19
J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan dan Jenis-Jenis Perkawinan di Indonesia .....	21
B. Konsep Perkawinan di Bawah Tangan .....	46
C. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan .....	57
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan .....	67

B. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan .	71
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan .....	73
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
A. Proses Permohonan Akta Lahir Anak Bagi Pasangan yang Tidak Menikah di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) .....	86
B. Proses Penerbitan Akta Lahir Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan .....	88
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran.....	89
D. Akibat Hukum Setelah Anak Mendapatkan Akta kelahiran ..	91
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I Jumlah data perkawinan di Kantor Urusan Agama Medan	
Petisah, Medan Sunggal dan Medan Helvetia .....	52
Tabel II Jumlah data perkawinan yang tidak tercatat mendapatkan akta	
kelahiran anak sebelum berlakunya SPTJM .....	54
Tabel III Jumlah data perkawinan yang tidak tercatat mendapatkan akta	
kelahiran anak sesudah berlakunya SPTJM .....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kawin sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan , baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah, dan bahkan keatas, dari masyarakat biasa, para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya sering di sebut sebagai istri simpanan.<sup>1</sup>

Ini masalah kecil tapi sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu, terutama dampak terhadap anak karena anak dari hasil nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kejelasan status dan kedudukan anak tersebut masih dipertanyakan.

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang, maka diatur dalam peraturan Presiden

---

<sup>1</sup> Irfan Islami , perkawinan dibawah tangan, ADIL: Jurnal Hukum,vol 8. No. 1: 80.

Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 51 Ayat (1), menyebutkan bahwa Setiap peristiwa kelahiran di catatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran. Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah Perangkat pemerintah, kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintah dalam negeri.

Pencatatan kelahiran anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tuanya, karena berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU Administrasi Kependudukan), ditentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil (selanjutnya disingkat Perpres No. 25 Tahun 2008), ditegaskan bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Perlu pula diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 14 Perpres No. 25 Tahun 2008, yang menentukan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 angka 16 Perpres No. 25 Tahun 2008, ditentukan pula bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak adalah memiliki kutipan nikah/buku nikah (perkawinan tercatat), bagi yang tidak memiliki kutipan nikah/buku nikah (perkawinan tidak tercatat) pencatatan tetap dilaksanakan dengan catatan sebagai anak ibu. sementara di lapangan

yang tidak memiliki kutipan nikah/buku nikah (perkawinan tidak dicatat) sudah dilampirkan di dalam akta kelahirannya sebagai anak ayah dan ibupun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (selanjutnya disingkat Permendagri No. 9 Tahun 2016). Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 9 Tahun 2016, ditentukan bahwa persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- (1). surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- (2). akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- (3). KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- (4). KTP-el orang tua/wali/pelapor;
- (5). paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing,<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2), ditentukan bahwa dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran

---

<sup>2</sup> Vivi Lia Falini Tanjung, Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Jurnal Restitusi, Volume I Nomor 1, (Januari-Juli 2019), h. 25.

data kelahiran. Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran harus ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang saksi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Permendagri No. 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ketentuan ini juga dapat menimbulkan permasalahan yuridis, karena saksi yang dimaksudkan dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 bukan saksi yang melihat peristiwa kelahiran, melainkan saksi yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM.<sup>3</sup>

Melihat kenyataan tersebut, implementasi di lapangan menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu obyek untuk dijadikan penelitian, yakni proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak, implikasi dari nikah di bawah tangan dalam proses permohonan akta kelahiran anak ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perkawinan nikah di bawah tangan perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari Perkawinan di bawah tangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah tangan terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perkawinan nikah di bawah tangan perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari Perkawinan di bawah tangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah tangan terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini, yaitu berupa kemanfaatan dan kemaslahatan yang akan dicapai dalam penelitian ini yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hal antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syaksiyah.
  - b. dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan

lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini berkenaan dengan proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari hasil nikah dibawah tangan, untuk memberikan sumbangan bagi kepastian hukum status anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai manifestasi dari persyaratan yang telah ditentukan oleh Jurusan Al-Akhwat As-Syakhsyah guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S,H). Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan, penulis juga mengharapkan dapat menjadi kontribusi positif kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan juga praktisi hukum.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk lebih terarah dan fokusnya penelitian ini, maka penulis membatasinya hanya pada persoalan yang berkaitan dengan Implikasi nikah



di bawah tangan dalam proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak, pengertian implikasi secara bahasa adalah efek yang timbul di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. andai kata terdapat juga uraian diluar pokok pembahasan maka hal itu erat sekali kaitannya dengan masalah yang dibahas yang dirasa sangat perlu untuk mengemukakannya demi perbandingan agar mendapatkan pemecahan yang tepat. dan penulis membatasi lokasi penelitian hanya di tiga Kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Helvetia, dikarna ketiga kecamatan inilah yang mudah dijangkau penulis.

## **F. Kajian Terdahulu**

Maka dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang hubungan antara permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Skripsi Mira Desy Arianti tahun 2016 yang berjudul “*Studi Tentang Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda*”.

Penelitian terdahulu sangat berbedaa dengan penelitian sekarang. perbedaan dalam skripsi tersebut penelitian terdahulu lebih menekankan pada penghambat dan pendukung prosedur pembuatan akta kelahiran. Sedangkan

penelitian yang akan datang lebih menekankan pada implementasi prosedur pembuatan akta kelahiran bagi yang nikah dibawah tangan. Dan lokasi penelitian terdahulu berada di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Sedangkan peneliti yang sekarang berlokasi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

Skripsi Reny Puspitasari tahun 2009 yang berjudul *“Proses Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Terlambat Mendapat Akta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”* . Penelitian terdahulu sangat berbedaa dengan penelitian sekarang. perbedaan dealam skripsi tersebut penelitian terdahulu lebih menekankan pada proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendapat akta. Sedangkan penulis akan lebih menekankan implementasi prosedur pembuatan akta kelahiran bagi pasangan yang nikah di bawah tangan. Dan lokasi penelitian terdahulu berada di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan peneliti yang sekarang berlokasi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Dan Kantor Kantor Urusan Agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris.<sup>4</sup>

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat mengakibatkan perubahan sosial, maka diperlukan dilakukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian studi kasus sering digambarkan sebagai metodologi yang fleksibel, menantang dan paling umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial.<sup>5</sup> Adapun studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan Prose

---

<sup>4</sup> Depri Liber Sonata, metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode peneliti hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 no 1 (Januari-Maret 2014), h. 27.

<sup>5</sup> Unika Prihatsanti, Suryanto, & Wiwin Hendriani, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, *Jurnal Buletin Psikologi* 2018, Vol. 26, No. 2:127.

pembuatan akta lahir anak bagi pasangan yang nikah di bawah tangan. Penelitian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>6</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.<sup>7</sup>

Kemudian pendekatan peraturan perundang-undangan yang penulis maksud adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran .

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan Kantor Urusan Agama. Penelitian dilokasi tersebut

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke-6, (Jakarta : Kencana ,2010), hlm. 97 .

<sup>7</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

sangat tepat untuk diteliti, karna ingin mengetahui Proses pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan yang nikah di bawah tangan dan ditempat tersebut sangat cocok sebagai objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang dibagi dalam dua bentuk: sumber data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.<sup>8</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yang ada

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DI*, ( Bandung : Alfabeta , 2016) h. 137.

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dan literature lainnya.<sup>9</sup>

## 5. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>10</sup> Yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang – undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang bersifat memaksa serta memiliki sangsi yang tegas untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Pada penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, Al Hadist, Perpres No 25 Tahun 2008, Perpres No 96 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>11</sup> bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet Ke -6, h. 141.

<sup>11</sup> *Ibid*

membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik bahasa.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder.<sup>12</sup> dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia dan seterusnya.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam yaitu : Interview atau wawancara, Observasi atau pengamatan, dan studi dokumen atau bahan pustaka.

---

<sup>12</sup> Balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/. Diakses pada 03 oktober 2019.

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *pengantar penelitian hukum* ( Jakarta : Press, 1986), h. 201-246

a. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah semua dasar ilmu pengetahuan. Bagi para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh ( benda ruang angkasa ) dapat di observasi dengan jelas.

Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap “ Implikasi Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ( Studi kasus Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan).

b. *Interview* ( Wawancara )

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang suatu objek kajian. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk *indepth interview* (wawancara Mendalam )dimana objek wawancara adalah informan dan narasumber.



Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama atau kalangan akademisi.

## 7. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang diteliti apa adanya, data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, observasi, wawancara akan diolah dan dianalisis dengan teliti, kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## H. Kerangka Pemikiran

An-nikah menurut bahasa secara hakiki berarti *al- wathu'* (bersetubuh), dan secara majazi berarti *al- 'aqdu* yang artinya ikatan.

Sedangkan menurut istilah suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenang-senang dengan perempuan baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya untuk bersenang-senang.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>14</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan : CV Manhaji, 2016). h. 2.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>15</sup>

Menurut pasal (2) kompilasi hukum islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>16</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-und angan yangf berlaku.

Nikah Sirri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat dilembaga negara.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 pasal 27 ayat (1) merumuskan "setiap kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadi peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Dan pasal 28 ayat (2) " kutipan akta

---

<sup>15</sup> Lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974.

<sup>16</sup> Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

<sup>17</sup> Irfan Islami , perkawinan dibawah tangan, Adil: Jurnal Hukum, h.76.

kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana.<sup>18</sup>

## **I. Hipotesis**

Sebagaimana pokok permasalahan yang sudah penulis kemukakan, maka analisis sementara penulis tentang pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan dibawah tangan, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, orang-orang yang mengurus akta kelahiran bagi perkawinan dibawah tangan yang tidak mempunyai buku nikah bisa mengurus akta kelahiran anak dengan menggunakan STPJM dari kantor tersebut dan didalam akta yang dikeluarkan oleh kantor pendudukan dan catatan sipil sudah tercantum nama kedua orang tua si anak dengan catatan perkawinannya belum tercatat.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Dalam kaitanya ddengan penulis skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode

---

<sup>18</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016.

penelitian, kajian terdahulu. Kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teoritis, Jenis-jenis perkawinan Di Indonesia, Konsep nikah Di Bawah Tangan, faktor yang melatar belakangi nikah di bawah tangan, Dampak terjadinya nikah dibawah tangan akibat hukum nikah dibawah tangan.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan , Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Medan.

BAB IV: Hasil Penelitian, Proses Permohonan Akta Lahir Anak Bagi Pasangan yang Tidak Menikah Di Hadapan PPN, Proses Penerbitan Akta Lahir Anak Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, Faktor Penghambat Dan Pendukung Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran, Akibat Hukum Setelah Anak Mendapatkan Akta.

BAB V: Penutup, kesimpulan, saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Perkawinan dan Jenis – Jenis Perkawinan di Indonesia**

Menurut ketentuan Undang–Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Hal yang sama juga diintroduksi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup>

Dari dua definisi tersebut antara Undang-Undang dan KHI tidak ada perbedaan yang signifikan tentang pengertian perkawinan. selain itu baik Undang-Undang Perkawinan dan KHI menempatkan keabsahan perkawinan itu harus terpenuhi syarat dan rukun sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pada bagian ketentuan umum.

<sup>20</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun. Undang-Undang ini diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Ada beberapa jenis perkawinan yang terjadi di Indonesia yaitu :

#### 1. Perkawinan Sah

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Yang berbunyi:<sup>21</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.<sup>22</sup>

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.<sup>23</sup>

Berdasarkan UU 22/1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017, h. 256.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 256

## Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

## Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:<sup>24</sup>
  - a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 262



- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya.

Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lainnya sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntunan hukum dan hukum administrasi dari atasan terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya.

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali

dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau maskawin.<sup>25</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.<sup>26</sup> Berdasarkan pendapat ini adapun rukun dan syarat perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon suami, dengan syarat :

- 1) Muslim.
- 2) Merdeka.
- 3) Berakal.

---

<sup>25</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2017),h.9.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2006.), h.61.

- 4) Benar-benar laki-laki.
- 5) Adil.
- 6) Tidak beristri empat.
- 7) Bukan mahram calon istri.
- 8) Tidak sedang ihram haji dan umrah.

b. Calon istri, dengan syarat :

- 1) Muslimah.
- 2) Benar-benar perempuan.
- 3) Telah mendapat izin dari walinya.
- 4) Tidak bersuami atau dalam masa iddah.
- 5) Bukan mahram calon suami.
- 6) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

c. Shiqat (ijab dan kabul), dengan syarat :

- 1) Lafal ijab dan qabul harus lafal nikah atau tazwij dan bukan kata-kata kinayah atau kiasan.
- 2) Lafal ijab qabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.
- 3) Lafal ijab qabul harus terjadi pada satu majlis.

d. Wali calon pengantin perempuan, dengan syarat:

- 1) Muslim.

- 2) Berakal.
- 3) Tidak fasik.
- 4) Laki-laki.
- 5) Mempunyai hak untuk menjadi wali.

Susunan wali:

- 1) Bapaknya.
- 2) Kakeknya.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki sebapak.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
- 7) Paman dari bapak.
- 8) Anak laki-lakinya paman dari bapak.
- 9) Hakim.

e. Dua orang saksi, dengan syarat:

- 1) Muslim.
- 2) Berakal.
- 3) Baliqh.
- 4) Merdeka.

- 5) Laki-laki.
- 6) Adil.
- 7) Pendengaran dan penglihatannya sempurna.
- 8) Memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab qabul.
- 9) Tidak sedang ihram haji dan umrah.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. Undang-Undang hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan perkawinan sah adalah perkawinan yang terpenuhi syarat materil dan formil. Syarat materil yang berupa tercatatnya status

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

perkawinan itu sedangkan syarat formil syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi.

## 2. Perkawinan Dibawah Tangan

Kawin di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan merupakan nikah ilegal, tetapi menurut hukum islam, akad perkawinannya sah.<sup>29</sup>

Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan di bawah tangan dinyatakan sebagai “ belum terjadi perkawinan“ dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan di bawah tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuat akta nikahnya.<sup>30</sup>

Fatwa MUI : nikah sirri sah menurut hukum Islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah sirri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, Nikah sirri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad saebani, *FIQH MUNAKAHAT*, (Bandung: PUSTAKA SETIA), 2018, h. 84.

<sup>30</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h.146.

rumah tangga. " Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta, (30/5/2006).<sup>31</sup>

Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima' ulama se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang berlangsung 25-28 Mei 2006. Ia menjelaskan, nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana di atur oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, " perkawinan seperti itu di pandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan efek dampak negatif terhadap isteri dan anak yang di lahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris.<sup>32</sup>

### 3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut – larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di

---

<sup>31</sup> Nafilah Abdullah, Menyoal Kembali Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) di Indonesia Jurnal Musâwa, Vol. 12 No 1 Januari 2013. h. 69.

<sup>32</sup> *Ibid*

Indonesia sudah memiliki Undang – undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang – undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama, artinya Negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara melainkan ada 5 (lima) agama yang telah diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha.<sup>33</sup>

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Jadi, bukanlah “Peraturan Perundangan” itu secara keseluruhan. Hal – hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang – undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.

---

<sup>33</sup> Jane Marien Makalew, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1 No 2 April-Juni 2013, h. 133.



Diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing – masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing – masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang – undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.<sup>34</sup>

Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah

---

<sup>34</sup> *Ibid*

menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang – undang Perkawinan (UUP).<sup>35</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) memberi fatwa bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram.<sup>36</sup> Hal yang berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, Al-ma'idah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, dan At-Tahrim ayat 6.

Selain Al-Qur'an, juga hadis Rasulullah SAW.,” *barang siapa yang telah kawin, ia telah memelihara setengah dari imannya, karena itu, hendaknya ia takwal kepada Allah dan bagian yang lain*” (H.R. Al-Tabrani).<sup>37</sup>

Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i,” *Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan dengan lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknya lah yang menjadikan (beragama) Yahudi, Nasrani, dan Majusi.*”

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> MUNAS (Musyawarah Nasional) MUI, 11-17 Rajab 1400 H/ 1 Juni 1980 M.

<sup>37</sup> H.R. Al-Tabrani

Oleh sebab itu, MUI berpendapat bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram. MUI menambahkan tentang perkawinan laki-laki muslim dengan ahli kitab, “setelah mempertimbangkan mudratnya lebih besar daripada maslahatnya, MUI menfatwakan bahwa pernikahan itu haram hukumnya.<sup>38</sup>

Perkawinan beda agama memiliki mafsadat dan mudarat yang sangat besar dibandingkan manfaatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan akidah dan syariat orang Muslim diantaranya sebagai berikut:

a. Akidah

1) Orang kafir mengajak pada kekafiran

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, telah diharamkan pernikahan Muslim dan musyrik ataupun Muslim dengan kafir, baik golongan ahli kitab maupun tidak. Hal ini disebabkan orang musyrik, baik laki-laki ataupun perempuan mengajak kepada kekufuran. Orang musyrik tidak memiliki pedoman menuju jalan yang benar.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h.171.

<sup>39</sup> Wahbah bin Musthafa Zuhaili, *tafsir Al-munir fi Al-Aqidah wa Al-Syar'ah wa Al-Manhaj*, cet ke-2, Damaskus: Dar Fiqr Al-Mu'ashir, 1418 H, h.292.

- 2) Menghindari kawin beda agama agar dapat menjaga keimanan yang dapat menyelamatkan dari api neraka.

Firman Allah SWT. Dalam surat At Tahrim ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 211 bahwa Ibnu Katsir menjelaskan larangan menikah beda agama,” mereka mengajak ke neraka”, baik hidup dan berkumpul dengan mereka memotivasi untuk mencintai dan mementingkannya atas kepentingan akhirat.

- 3) Hilangnya sumber kebahagiaan

Menurut Ibnu Katsir, agama itu sangat penting karena memiliki istri yang beragama sangatlah mahal. Dalam Islam wanita saleh adalah perhiasan dunia. Adapun memiliki istri yang beragama merupakan kebahagiaan dan keberkahan hidup.<sup>40</sup>

b. Syariat

- 1) Nikah beda agama sama dengan zina.
- 2) Tidak adanya pahala ibadah,
- 3) Hukum anak (hak nafkah, perwalian).
- 4) Hukum waris ( hilangnya hak waris).

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.584.

Adapun ulama Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa tentang nikah beda agama. Ulama NU menegaskan bahwa nikah dengan orang yang berbeda agama di Indonesia hukumnya tidak sah (haram).

Majlis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang nikah beda agama. Secara tegas ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non Muslim. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2: 221).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkah orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Al-Baqarah (2):221).<sup>41</sup>*

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Al-Baqarah (2: 221)

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>42</sup>

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>43</sup>

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.<sup>44</sup>

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan

---

<sup>42</sup> Lihat di Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>43</sup> *Ibid*, h.28.

<sup>44</sup> *Ibid*,h, 39.

masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.<sup>45</sup>

#### 4. Perkawinan Mut'ah

Kawin mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan menggunakan lafazh "*tamattu, istimta*" atau sejenisnya. Ada yang mengatakan mikah mut'ah disebut juga kawin kontrak (mu'aqqat) dengan jangka waktu tertentu dan tidak tertentu, tanpa wali dan saksi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin putus karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu.<sup>46</sup>

Kawin mut'ah menurut Abdul wahab merupakan perkawinan yang dilarang (*bathil*). Larangan tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama dengan menyatakan bahwa tidak ada yang mengakui perkawinan tersebut. Seluruh imam Mazhab menetapkan kawin mut'ah adalah haram.<sup>47</sup>

Kawin mut'ah menurut jumhur ulama adalah seorang laki-laki mengawini perempuan dengan jumlah mahar tertentu dan dengan waktu

---

<sup>45</sup> Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015 h, 209.

<sup>46</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h.135.

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat 1*, h.55.

tertentu, baik untuk waktu panjang ataupun pendek. Kawin mut'ah sering disebut dengan kawin kontrak karena sifat waktunya yang dibatasi oleh suatu kontrak di awal hubungan.<sup>48</sup>

Perkawinan mut'ah ini akan berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak. Artinya, tertalak dengan sendirinya, jika waktu yang ditentukan telah tiba, tidak ada tanggungan nafkah dari suami kepada istri dan anak-anak (jika memiliki anak), tanggungan tempat tinggal, dan juga tidak bisa saling mewarisi diantara keduanya. Contohnya, seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, “ Aku bermut'ah kepadamu dengan waktu sepuluh hari dengan mahar sepuluh juta rupiah”. Kemudian sang perempuan menjawab : “ aku terima mut'ahmu” maka terlaksanalah kawin mut'ah itu.<sup>49</sup>

Nikah kontrak yang dilakukan menimbulkan dampak negatif atau ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan, untuk itu sedapat mungkin nikah kontrak dihindari. Untuk itu perlu menumbuhkan kesadaran pada masyarakat, terutama kaum perempuan bahwa ia adalah salah satu makhluk Allah SWT yang mulia. Ia bisa hidup sama dengan laki-

---

<sup>48</sup> Khusniati Rofi'ah, Nikah Mut'ah Sebagai Alternatif Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Justitia Islamica, Vol 9 No. 1 Juni 2012, h. 126.

<sup>49</sup> *Ibid*



laki bila dia menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, dengan cara menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan dia dapat berperan dalam masyarakat serta dapat tercegah dari perbuatan negatif yang merugikan diri dan anak-anaknya.

RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan juga dengan tegas melarang kawin mut'ah. Hal itu diatur pada pasal 39 dan pada pasal 144 diatur tentang hukuman terhadap pelaku kawin mut'ah. Pada pasal ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan perkawinannya batal karena hukum". Di samping itu, dalam perkawinan undang-undang juga mengharuskan adanya wali nikah, saksi, 'iddahnya tiga kali suci tiga kali haid, nafkah 'iddah, hubungan saling mewarisi antara suami isteri, hubungan orang tua dan anak serta tanggung jawabnya.<sup>50</sup>

Dalam hal ini setidaknya-tidaknnya dapat dikutip empat aturan Perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pancasila, terutama sila I, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila II, "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

---

<sup>50</sup> Isnawati Rais, Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014. h 103.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2).
- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- d. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan keempat hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Saleh Ridwan, PERKAWINAN MUT'AH Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jurnal Al-Qadāu Volume 1 Nomor 1/2014, h. 46

Dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam nikah mut'ah. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah mut'ah dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut'ah dan yang sejenisnya.<sup>52</sup>

Dalam kawin mut'ah aturannya tidak sejalan dengan ketentuan perundangundangan ini. Memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka kawin mut'ah terutama prakteknya di beberapa wilayah di Indonesia sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

## 5. Kawin Muhallil

*Muhalil* disebut pula dengan istilah dengan kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalakinya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang sudah ditalak

---

<sup>52</sup> *Ibid*

tiga, kemudian berdasarkan perjanjian, istri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya (rujuk).<sup>53</sup>

Tahlil artinya menghalalkan, yaitusuatu bentuk perkawinan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain. Hal ini karena istri telah ditalak tiga oleh suaminya.

Kawin cinta buta atau muhallil hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*Artinya : “Allah melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil).” (H.R. Ahmad. Sanadnya Hasan)<sup>54</sup>*

Hadis kedua dari Abdullah bin Mas’ud adalah hadis yang sama menjelaskan bahwa melakukan nikah tahlil hukumnya haram, bahwa

---

<sup>53</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, h. 69

<sup>54</sup> H.R. Ahmad. Sanadnya Hasan

Rasulullah SAW. Melaknatnya, sehingga pelakunya, baik laki-laki dan perempuan dianggap telah melakukan perbuatan terkutuk.

عن عبدالله بن مسعود قال : لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه الترمذي

*Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata bahwa rasulullah SAW. Melaknat muhallil dan muhallalnya”.<sup>55</sup>*

Pendapat tersebut dipegang oleh kalangan ulamadari para sahabat, misalnya : Umar bin Khattab, ‘Usman bin Affan, Abdullah bin Umar dan lain-lain, juga merupakan pendapat fuqaha dari golongan tabiin. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi’i, akad nikahnya dianggap sah. Adapun laknat dalam kasus muhallil adalah sebagai dosa semata. Oleh karena itu, tidak berpengaruh terhadap akad karena tidak disertai pembatasan waktu, seperti nikah mut’ah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah.<sup>56</sup>

## **B. Konsep Perkawinan di bawah Tangan**

---

<sup>55</sup> H.R Imam At Tirmizi

<sup>56</sup> *Ibid*

Pada dasarnya perkawinan adalah legalitas untuk menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sesuai dengan prosedur Negara. Adapun salah satu jenis perkawinan yang tidak memenuhi legal procedure yaitu kawin siri. Duraiwisy mengemukakan bahwa siri berasal dari sir atau sirrun dalam bahasa Arab yang bermakna sunyi atau rahasia. Kawin siri sendiri menurut arti diksi bermakna perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia yang dalam perkembangannya istilah kawin siri mempunyai keterikatan dengan aturan Negara. Sehingga kawin siri bermakna suatu perkawinan yang tidak dicatatkan kepada petugas pencatat akta nikah.<sup>57</sup>

Kawin siri dianggap sah secara agama Islam oleh masyarakat kebanyakan namun juga dianggap melanggar aturan pemerintah. Namun demikian konsep dan tafsir atas kawin siri tetap mengudara dari waktu ke waktu dan lebih kepada “merahasiakan” suatu perkawinan tertentu.

Sementara itu pemaknaan kawin siri dalam ajaran Islam merupakan suatu bentuk substantif yang di dalamnya terdapat kekurangan syarat dan rukun perkawinan meskipun dilihat secara formal itu terpenuhi. Sedangkan dari sisi sosiologisnya masyarakat dalam spektrum perundangan akan

---

<sup>57</sup> Thriwaty Aarsal, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 6. No. 2. September 2012. h. 163.

dimaknai bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang.<sup>58</sup>

Secara etimologis sirri berarti sesuatu yang tersembunyi, rahasia, pelan-pelan, tidak secara terang. Berbeda dengan jaher, artinya terbuka, tidak rahasia, secara terang.<sup>59</sup> Dalam kaitannya dengan nikah atau perkawinan, pada umumnya masyarakat mengartikan nikah sirri atau perkawinan siri mempunyai beberapa pengertian, yakni:

Pertama, perkawinan tanpa wali. Perkawinan semacam ini kadang dilakukan secara rahasia atau siri, sebab wali perempuan mungkin tidak setuju atau mungkin pula karena keabsahan perkawinan dianggap belum terpenuhi. Mungkin pula hanya demi memuaskan nafsu syahwat sehingga mengindahkan ketentuan syariat-syariat. Perkawinan seperti yang dijelaskan ini jelas sekali sangat tidak sah, sebab wali merupakan rukun sah nikah.<sup>60</sup> Hal ini mendasarkan pada Hadits-hadits riwayat yang lima kecuali Imam Nasa'i, hadits riwayat Ibnu Majah dan Addaruqutny.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 163

<sup>59</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/23505-ID-perkawinan-sirri-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-hukum-positif.pdf> diakses pada tanggal 8 oktober 2019.

<sup>60</sup> Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)", Jurnal Cendekia Vol 12 Nomor 1 Januari 2014, h. 24.

Hadits riwayat yang lima kecuali Imam Nasa'i yang pertama menyatakan "bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali", yang kedua menyatakan "bahwa wanita manapun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil". Kemudian hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ad Daruqutny yang menyatakan "bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri".

Kedua, perkawinan yang secara agama sah namun tidak kunjung dicatatkan dalam lembaga Negara. Perkawinan ini kan secara agama sah, akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang perkawinan tersebut tidak sah. Adapaun fungsi dari pencatatan perkawinan pada lembaga adalah supaya seseorang itu memiliki bukti atau alat bukti untuk digunakan membuktikan bahwa dirinya benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain.<sup>61</sup>

Ketiga, perkawinan yang sengaja dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contohnya, perkawinan yang dilakukan rahasia karena takut memperoleh stereotip dari masyarakat yang sudah terlanjur menganggap suatu perkawinan siri itu tidak baik. Bahkan bisa jadi karena

---

<sup>61</sup> *Ibid*



pertimbangan ini memang berbelit-belit sehingga memaksa seseorang untuk merahasiakannya.<sup>62</sup>

Nikah siri dalam realitas masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori nikah bi ghair al bayyinah (pernikahan tanpa disertai bukti). Nikah siri dilakukan dengan ijab qabul yang dihadiri dua mempelai, wali, dua saksi, dan diketahui oleh masyarakat, hanya saja tidak dilakukan pencatatan sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 (2). Dalam perspektif fikih, nikah siri hukumnya sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi belum mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara karena tidak adanya akta tertulis yang menjadi bukti legalitas formal adanya pernikahan.<sup>63</sup>

Nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan seseorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan merupakan kawin illegal, tetapi menurut hukum islam akad perkawinannya sah.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Ni'matun Naharin, Nur Fadhilah, Perkawinan Di Bawah Tangan ( nikah siri) dalam perspektif feminis, Jurnal Ahkam, Vol. 5, No. 2, November 2017. h.367.

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 84

Istilah “nikah di bawah tangan” muncul setelah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UU perkawinan. Dengan demikian, dapat dirumuskan, bahwa nikah di bawah tangan, ialah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>65</sup>

Setelah ditetapkannya peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan:

Pasal 2 Ayat 1: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>66</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

Pasal 5 Ayat 1 : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus di catat.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup><http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.com/2013/01/nikah-sirri-nikah-di-bawah-tangan-dan.html> diakses 10 Oktober 2019

<sup>66</sup> Undang – Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, h. 2

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.15

Bagi masyarakat muslim di catat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, sedangkan bagi masyarakat non muslim atau perkawinan silang antara muslim dan non muslim di catat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Catatan Sipil.

Namun secara realita masih ada pernikahan-pernikahan yang tidak memenuhi prosedur hal ini kurangnya pemahaman hukum antara hukum Islam dengan hukum perundang-undangan yang berlaku seperti nikah di bawah tangan.

Menurut hukum Islam, untuk dapat dilakukannya perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat yang dimaksud adalah adanya kedua mempelai, wai, ijab qabul, saksi dan pemberian mahar (mas kawin). Dengan terpenuhinya kelima syarat tersebut hukum Negara mengharuskan agar keseluruhan proses perkawinan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah,

Perkawinan di bawah tangan menurut hukum islam sah, walaupun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, sehingga terhadap perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatatan nikah, perkawinan yang dimaksud tetap sah. Perkawinan di bawah tangan sah menurut hukum islam, maka semua implikasi hukum setelah itu (akibat

hukum dari perkawinan yang sah) menjadi sah. Menurut hukum islam setelah adanya perkawinan yang sah, maka akan mengesahkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dianggap tidak sah.<sup>68</sup> Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh kiai dan ulama atau seorang yang dipandang telah mengetahui hukum –hukum munakahat (perkawinan).<sup>69</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah data perkawinan di Kantor Urusan Agama Medan Petisah,**  
**Medan Sunggal dan Medan Helvetia.**

<b>Nama kecamatan</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
Medan Petisah	531	584	594
Medan Sunggal	555	553	622
Medan Helvetia	655	620	748

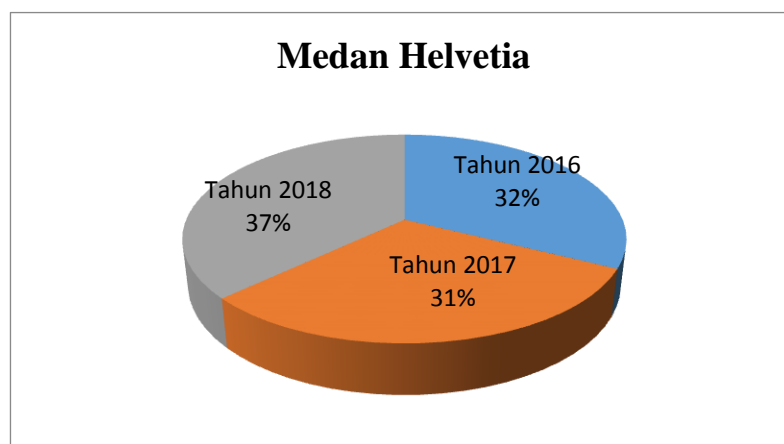
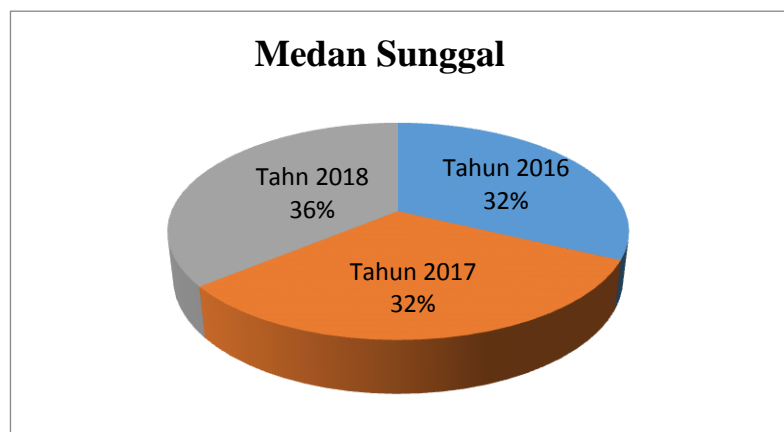
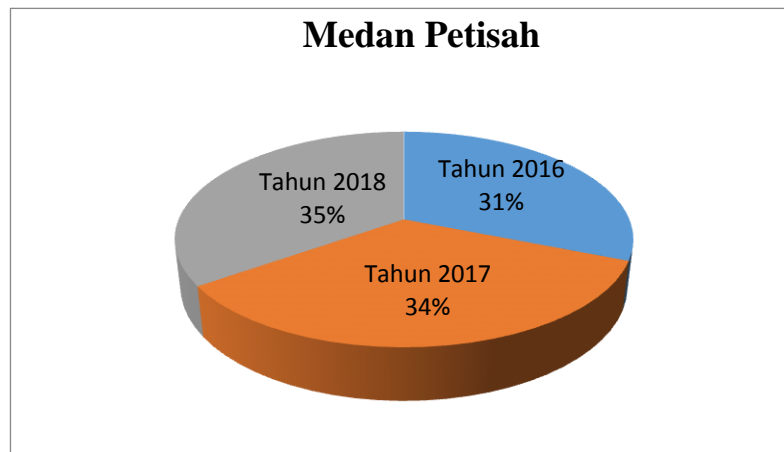
Dari jumlah data diatas yang meningkat dari tiap tahunnya yaitu Kecamatan Medan Petisah dari tahun 2016 ke tahun 2018 meningkat drastis. Sedangkan Medan Sunggal dan Medan Helvetia dari tahun 2016 ke tahun

---

<sup>68</sup> Samuji, *Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, JURNAL PARADIGMA Volume 2, Nomor 1, November 2015 h. 05.

<sup>69</sup> [Http://Zhalabe.blogspot.com/2012/05/pengertian-nikah-sirri.html](http://Zhalabe.blogspot.com/2012/05/pengertian-nikah-sirri.html), diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 21.30

2017 menurun, akan tetapi dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat kembali dan lebih tinggi dari tahun 2016.<sup>70</sup>



**Tabel 2**

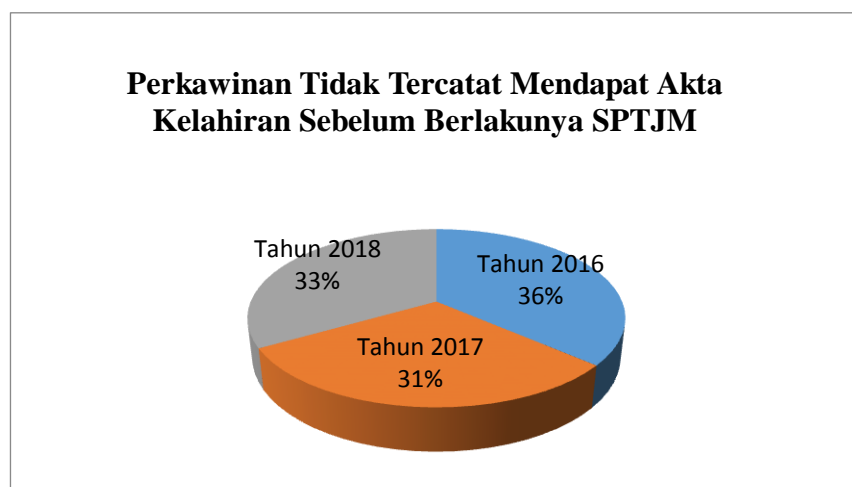
---

<sup>70</sup> Diperoleh dari Kantor Urusan Agama

**Perkawinan yang tidak tercatat mendapat akta kelahiran anak sebelum diberlakukannya SPTJM.**

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
14.213	11.901	13.004

Berdasarkan Tabel 2 hanya menjelaskan jumlah data keseluruhan yang mendapatkan akta kelahiran bagi pasangan perkawinannya tidak tercatat status anak masih anak ibu dan nana ayah tidak di cantumkan di dalam akta kelahirannya. Di tahun 2016 tingginya angka pengurusan akta kelahiran kantor catatan sipil Kota Medan berbeda dengan tahun sesudahnya karena ditahun 2016 salah satu penyebab banyaknya masyarakat mengurus akta dikarenakan banyaknya masyarakat sadar bahwa perlunya akta kelahiran terutama untuk pendidikan anak.



Perspektif Kantor Catatan Sipil perkawinan di bawah tangan itu termasuk kategori perkawinan tidak tercatat dan data yang ditemukan penulis

dari kantor catatan sipil bahwa pelaku kawin di bawah tangan berjumlah 11 orang di tahun 2018 dan 9.391 orang pada tahun 2019 dari jumlah data yang dimaksud sudah termasuk didalamnya surat keterangan lahir yang hilang, nikah tanpa buku nikah(perkawinan tidak dicatat) baik dia muslim atau non muslim. Dan buku nikahnya hilang baik terbakar dan hanyut dicaripun datanya di KUA sudah tidak ada sehingga tidak ada yg membuktikan keabsahan perkawinannya.

**Tabel 3**  
**Perkawinan yang tidak tercatat mendapat akta kelahiran anak**  
**sesudah berlakunya SPTJM.**

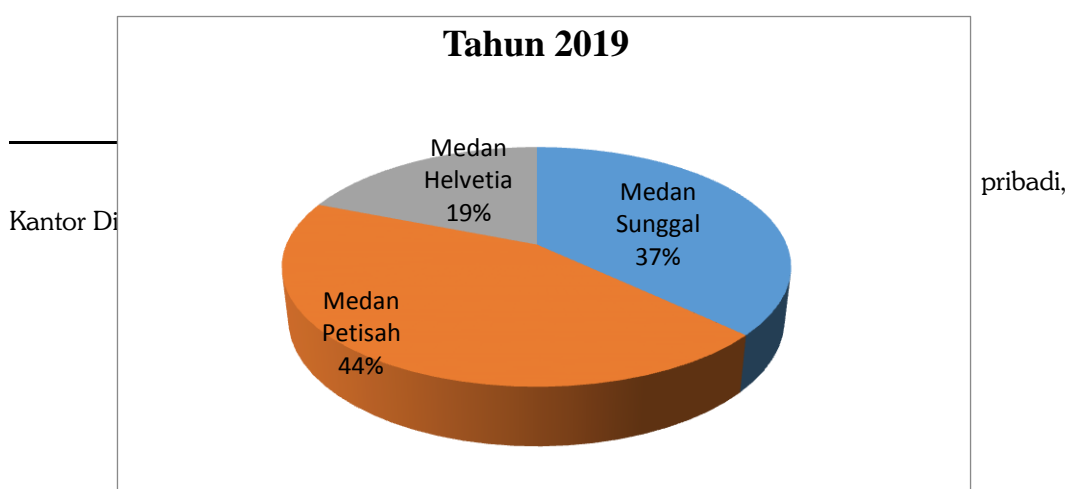
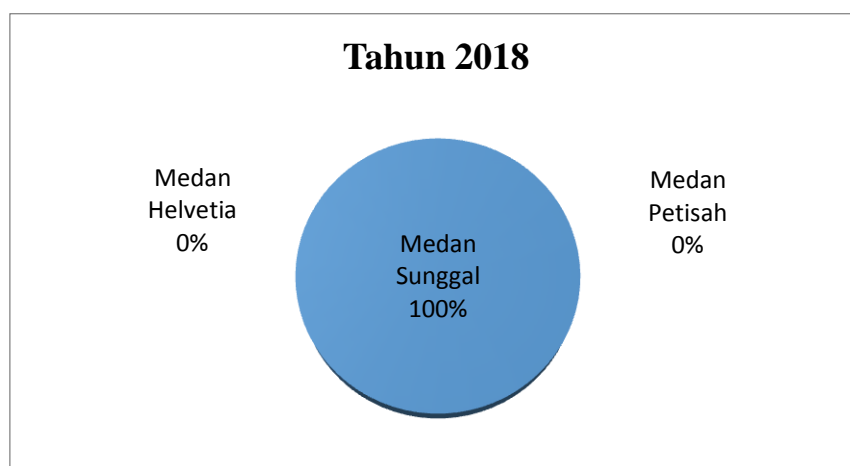
<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
Medan Sunggal	1	535
Medan Petisah	0	636
Medan helvetia	0	275

Sumber data Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota medan.

Berdasarkan tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa dari 21 kecamatan di Kota Medan penulis hanya mengumpulkan data dari tiga kecamatan, karna ketiga kecamatan tersebut sangatlah mudah dijangkau oleh penulis untuk mengadakan penelitian inilah alasan penulis. di tahun 2018 yang mengurus

akta kelahiran menggunakan SPTJM masih sedikit karna di tahun inilah baru diterapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016.

Data yang diperoleh penulis di tahun 2018 dari Kecamatan yang dipilih baru hanya kecamatan sunggal yang ada mengurus akta kelahiran anak menggunakan SPTJM dan mulai dari tahun 2019 mulai membanyak. Sementara jumlah data yang diperoleh penulis dari keseluruhan kecamatan di Kota Medan mulai dari diterapkannya SPTJM sampai Desember 2018 berjumlah 11 data dan mulai dari 1 januari 2019 sampai 31 juli 2019 berjumlah 9.391 data.<sup>71</sup>





### **C. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan**

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif, pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan dalam suatu perkawinanyang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, ada bukti autentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui secara yuridis.<sup>72</sup>

Menurut Abdul Ghani Abdullah, suatu perkawinan diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah, kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Suatu perkawinan sirri yang tidak di catatkan karena belum

---

<sup>72</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 151

memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, tidak mempunyai akibat hukum.

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.<sup>73</sup>

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:<sup>74</sup>

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Hlm.152

<sup>74</sup> Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990.

2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat

akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.
7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak

tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.

8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal.

Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.

9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.

10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.<sup>75</sup>

Administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah :

---

<sup>75</sup> Irfan Islami , perkawinan dibawah tangan, ADIL: Jurnal Hukum, vol 8. No. 1.h. 86

### 1. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

### 2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

### 3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Kemudian dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan, baik terhadap istri maupun anak-anak adalah :<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Zusma Widawaty, A. Wahab, Elvina, Aryati, M. Yazid AR, Pentingnya Pencatatan Perkawinan Dan Dampak Perkawinan Bawah Tangan (Dari Segi Hukum Negara) Di Desa Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Jurnal Proceeding Seminar Nasional Politeknik, Vol.2 No.1 September 2018, h B43.

## 1. Terhadap Istri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah
- b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- c. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi

Secara sosial :

Anda akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

## 2. Terhadap Anak

Sementara terhadap anak, tidak sah nya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni :



- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Didalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
- b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.<sup>77</sup>
- Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h B44.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan/perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota**

##### **Medan**

##### **1. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensial untuk terwujud. Visi ditetapkan merupakan gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen murni dari seluruh masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

Tujuan penetapan visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang menjadi perekat dan menyatukan gagasan yang strategis, melalui orientasi terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan menjamin keseimbangan organisasi.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan diharapkan akan dapat mendukung Visi Kota Medan yaitu : **“Medan Kota Metropolitan yang Modren, Madani dan Regilius”**.

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah :

***“Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terpercaya”.***

2. Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan visi, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang akurat Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
4. Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Keempat misi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan diatas memiliki makna, rasionalitas atau alasan obyektif sebagai berikut, yaitu:

## **1. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Administrasi**

### **Kependudukan dan Catatan Sipil Kepada Masyarakat**

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terhadap masyarakat haruslah prima. Artinya pelayanan itu harus mengutamakan kepuasan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Pelayanan prima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan diseyogyakan menjangkau seluruh kelompok dan lapisan masyarakat Kota Medan agar proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat berlangsung secara merata dan menyeluruh sehingga tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat tercapai.

## **2. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat**

### **Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Data dan informasi yang akurat tentang kependudukan dan catatan sipil sangat dibutuhkan, karena perencanaan dan proses pembangunan yang baik harus didukung dengan data dan informasi yang akurat, untuk bidang kependudukan data dan informasi tentang penduduk digunakan dalam rangka perencanaan dan proses pembangunan yang berorientasi penduduk.

Sedangkan data dan informasi bidang catatan sipil sangat dibutuhkan masyarakat, karena kejadian penting dialami masyarakat yang telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai Dokumen penting Seumur Hidup dan memiliki kekuatan hukum.

### **3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya**

#### **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Administrasi kependudukan yang baik tidak dapat tercapai apabila hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, melainkan harus ada partisipasi masyarakat luas. Untuk itu karena kesadaran masyarakat akan pentingnya Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat lebih ditingkatkan, guna tercapainya tujuan pembangunan.

### **4. Meningkatkan kualitas aparatur dinas kependudukan**

Tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil akan dapat tercapai apabila aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Di sisi lain, hal itu harus didukung oleh ketertiban masyarakat, tidak saja dalam bentuk kesadaran untuk mencatatkan diri, tetapi juga kesediaan untuk turut membiayai proses penyelenggaraan administrasi kependudukan

dan catatan sipil. Oleh karena itu, kualitas aparatur dan partisipasi masyarakat merupakan dua sisi dari satu realitas yang sama yang harus ada agar visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dapat terwujud.

## **B. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan**

### **1. Struktur Organisasi**

Sebagaimana diatur dalam keputusan Walikota Medan No. 01 Tahun 2017, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan merupakan unsur penunjang pemerintah kota Medan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
  - a. Seksi Identitas Penduduk;
  - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
  - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Seksi Kelahiran;
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
  - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan Informasi.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:
  - a. Seksi Kerjasama;
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - c. Seksi Inovasi Pelayanan.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



### **C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota Medan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksana tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai keputusan Walikota Medan No. 01 Tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja;
- b. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya;

- d. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja dinas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Penyusunan Program.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

- a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, surat keterangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, pengadaan barang dan perlengkapan kerumahtanggaan, mengelola administrasi dibidang kepegawaian serta urusan umum lainnya.

- b) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- c) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja dinas, menganalisa dan menyajikan data serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja dinas.

## **2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan dan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Identitas Penduduk;
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
- c. Seksi Pendataan Penduduk.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang:

- a. Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

- b. Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- c. Seksi Pendataan, mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

### **3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan pencatatan sipil penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang Asing. Untuk melaksanakan tugas dibidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan penduduk;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Seksi Kelahiran;
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

- a. Seksi Kelahiran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

c. Seksi Perubahan Status Anak kewarganegaraan dan kematian,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak. Perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

#### **4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas. Bidang Pengelolaan informasi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengendalian dan pengawasan, serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Untuk melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi



kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelol dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelol dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelol dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penegndalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari

:

- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
- c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan Informasi.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi

informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

## **5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang data dan invasi pelayanan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovaso Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta invasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan korrodinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfatan data dan dokumen kependudukan;

- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- c. Sesi Inovasi Pelayanan

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

- a. Seksi kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- c. Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Proses Permohonan Akta Lahir Anak Bagi Pasangan yang Tidak Menikah di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah**

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sub Bagian Umum yang mengatakan :

Bahwa proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak tidaklah sulit dan tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena akta kelahiran tersebut penting sekali artinya dewasa ini, seperti misalnya dalam hal proses pendidikan.<sup>78</sup>

Akta kelahiran sangatlah penting, karena akta kelahiran dijadikan sebagai satu bukti tertulis yang autentik yang mencantumkan dengan jelas tentang tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirannya serta ditegaskan pula nama orang tuanya yang melahirkan dan juga hubungan orang tuanya,

---

<sup>78</sup> Dewi Husnita Nst, Sub Bagian Umum, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 17 Oktober 2019.

apakah sebagai suami isteri yang sah atau tidak, hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.<sup>79</sup>

Di Negara Indonesia, yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.

Adapun persyaratan kelengkapan dalam proses permohonan akta kelahiran anak setelah mengisi formulir pendaftaran adalah<sup>80</sup>:

1. Kartu keluarga;
2. KTP suami dan istri;
3. Surat kelahiran anak (Bidan/Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas);
4. Buku nikah (muslim)/Akta Pencatatan Sipil (non muslim);
5. Dua orang saksi

Bagi yang tidak memiliki akta nikah sebagai gantinya melampirkan SPTJM. Setelah persyaratan lengkap akan di periksa petugas kalau sudah lengkap seterusnya di proses dan di klarifikasi.

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Berkas Formulir permohonan untuk memperoleh akta kelahiran anak.

## **B. Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan**

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum, yaitu tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>81</sup>

Ada 2 jenis akta kelahiran, yakni:

1. Akta kelahiran baru umur 1 s/d 60 hari

Yakni akta kelahiran baru lahir yang diajukan permohonannya untuk anak yang berumur 1 sampai 60 hari dari kelahirannya.

2. Akta Kelahiran Terlambat

Akta ini di sebut juga dengan akta kelahiran dispensasi, yakni akta yang diajukan permohonan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang (lebih dari 60 hari sejak kelahirannya).<sup>82</sup> Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan kepada instansi pelaksana.

Adapun isi dari akta kelahiran anak adalah<sup>83</sup> :

---

<sup>81</sup> Adisti Maritadinda Admar, Sub Bagian Penyusunan Program, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2019.

<sup>82</sup> *Ibid.*,

<sup>83</sup> Hasil Observasi dengan melihat akta kelahiran.



1. Data lahir;

Meliputi kewarganegaraan, tempat kelahiran, hari, tanggal, bulan, tahun, kelahiran, nama lengkap anak, jenis kelamin, nama orang tua

2. Nomor akta;

3. Tanggal, bulan dan tahun penerbitan;

4. Tanda tangan pejabat yang berwenang;

Untuk pengajuan akta kelahiran baru lahir umur 1 sampai 60 hari sejak kelahirannya tidak dikenakan biaya sama sekali, Sebaliknya untuk akta kelahiran terlambat dikenakan denda retribusi sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai denda atas keterlambatan dalam proses pengajuan tersebut.<sup>84</sup> Dan proses terbitnya tidaklah lama hanya menunggu selama empat hari akta sudah bisa di terima.

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran**

Faktor penghambat dalam pelayanan akta kelahiran yaitu masyarakat kurang menyadari akan pentingnya akta kelahiran sehingga tidak peduli terhadap dokumen dimana butuh baru sibuk mencari dokumen-dokumen yang terkait. Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan

---

<sup>84</sup> Adisti Maritadinda Admar, Sub Bagian Penyusunan Program, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2019.

beroperasi dengan sistem yang terlink se-indonesia apabila banyak pendaftaran maka jaringan penuh contohnya pendaftaran CPNS, pendaftaran perkuliahan secara online jadi jaringan banyak yang terpakai sehingga mengakibatkan gangguan jaringan ataupun offline.

Kesadaran dan bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan adalah faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Medan telah memadaidan sudah bekerja dengan bidang masing-masing serta pelayanan akta kelahiran sudah menerapkan standar operasional pelayanan (SOP).

Dan akan hadir inovasi-inovasi yang akan dibuat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berupa aplikasi apabila berjalan bagus maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan membuat kios disetiap kecamatan yang akan mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus keperluannya di Dinas Catatan Sipil contohnya pembuatan KTP hanya cukup mendatangi kios terdekat dan melengkapi persyaratan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Adisti Maritadinda Admar, Sub Bagian Penyusunan Program, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2019.

#### **D. Akibat Hukum Setelah Anak Mendapatkan Akta Kelahiran**

Menurut ketentuan Perpres No 25 Tahun 2008 salah satu syarat untuk mendapatkan akta lahir dengan adanya buku nikah yang artinya bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah atau perkawinan di bawah tangan pencatatan tetap dilaksanakan dengan catatan si anak sebagai anak ibu karna hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada sehingga tidak dapat membuktikan bahwa anak itu adalah anak yang dilahirkan dari kedua pasangan suami istri yang sah.

Kontradiktif dengan Permendagri No 9 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah atau perkawinannya di bawah tangan bisa memperoleh akta kelahiran yang di dalam akta kelahiran si anak tersebut sudah dicantumkan nama ayah dan ibunya hanya dengan melampirkan SPTJM sebagai tambahan dengan catatan perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan.

Permendagri ini sejalan dengan Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang syarat dan pencatatan kelahiran terdapat pada pasal 33 ayat 1 pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Surat keterangan kelahiran;
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
3. KK; dan
4. KTP-el.<sup>86</sup>

Didalam pasal 34 bagi penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan di ketahui oleh 2 (dua) orang dalam hal;

1. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
2. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Dan bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan tidak diketahui asal usulnya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan SPTJM tersebut dan inilah yang berlaku pada saat ini.

Hasil dari pembuatan akta kelahiran yang menggunakan akta perkawinan akan berbeda dengan yang tidak mempunyai akta perkawinan

---

<sup>86</sup> Lihat dalam Perpres No 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sehingga, dari data yang penulis dapatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan dalam hal pembuatan akta kelahiran yang menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri atau yang tidak melampirkan buku nikah/akta perkawinan orang tua terdapat penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” frasa tersebut ada apabila status dalam KK tersebut menunjukkan sebagai suami istri. Dan apabila dalam KK tidak menunjukkan sebagai pasangan suami istri maka anak tersebut dinasabkan sebagai anak ibu.

Dengan adanya penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” dalam akta kelahiran, maka akta kelahiran mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dengan akta kelahiran yang tidak ada frasanya. Dari hasil data sekunder yang penulis dapatkan, akta yang terdapat frasa tersebut meskipun nama ibu dan ayah kandungnya tercantum dalam akta kelahirannya, anak dan istri secara hukum tidak dapat menerima nafkah dan warisan dari ayah kandung karena tidak ada hubungan keperdataan. Selain dari itu dampaknya adalah mengabaikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 2 ayat (2), dan mengabaikan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat

pada pasal 7. Sehingga dengan kemudahan pengurusan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak tercatat akan melalaikan pencatatan perkawinannya.

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa, akta nikah harus ada untuk menjamin hak-hak seorang istri dan anak yang dilahirkannya. Hal ini karna acuan dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan dengan KK. Adapun pengganti akta nikah adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), dan juga PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut ketentuan ayat kedua pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan kesahan suatu perkawinan. Selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan di bawah tangan merupakan kawin ilegal tetapi menurut hukum islam akad perkawinannya sah. Kalau dilihat dari perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan di bawah tangan dinyatakan “belum terjadi perkawinan”. Penulis menyimpulkan perkawinan sah adalah perkawinan yang terpenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil yang berupa tercatatnya status perkawinan itu sedangkan syarat formil yang terpenuhi syarat dan rukun perkawinan itu. Sementara perkawinan di bawah tangan hanya memenuhi syarat formil saja.
2. Proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak tidaklah sulit dan tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi

prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun persyaratan kelengkapan dalam proses permohonan akta kelahiran anak adalah Kartu keluarga, KTP suami dan istri, Surat kelahiran anak (Bidan/RumahSakit/Klinik/Puskesmas), Buku nikah (muslim)/Akta Pencatatan Sipil (non muslim), Dua orang saksi bagi yang tidak memiliki akta nikah sebagai gantinya melampirkan SPTJM.

3. Akta nikah harus ada untuk menjamin hak-hak seorang istri dan anak yang dilahirkannya. Hal ini karna acuan dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan dengan KK. Adapun pengganti akta nikah adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut sudah sesuai dan tidak menyalahi aturan dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), KHI pasal 5 ayat (1), dan juga PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang membolehkan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah, dan dari hasil pengguna SPTJM tersebut memang sudah dicantumkan nama ayah dan ibu si anak. Akan tetapi, terdapat tambahan frasa yaitu “yang perkawinannya belum tercatat sesuai



peraturan perundang-undangan”. Sehingga secara hukum anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis terhadap penelitian ini disampaikan kepada masyarakat :

1. Kepada masyarakat hendak mencatatkan perkawinannya, bagi masyarakat yang masih berstatus di bawah tangan ataupun nikah sirri hendaklah isbat nikah ke pengadilan dan mencatatkan ke KUA supaya perkawinannya sah dimata negara dan mendapatkan akta kelahiran yang menyatakan anak tersebut adalah hasil dari perkawinan suami istri yang sah.
2. Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat yang mengurus akta lahir anak yang status perkawinannya tidak tercatat agar mengisbat kan perkawinannya.
3. Kepada Kantor Urusan Agama supaya lebih mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan terhadap masyarakat supaya tercapai ketertiban dalam pencatatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nafilah, Menyoal Kembali Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) di Indonesia Jurnal Musawa, Vol. 12 No 1 Januari 2013.

Aminah, Siti, Hukum Nikah di Bawah Tangan (nikah siri), Jurnal cendekia Vol 12 Nomor 1 Januari 2014.

Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji, 2016.

Arsal, Thriwaty, Nikah riri dalam tinjauan demografi, Jurnal sosiologi Pedesaan, Vol 6. No 2, september 2012.

Asiah, Nur, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

Balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian hukum bawah-tangan-dan, html.

Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto, Agus, *Hukum Perkwinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

hhttp://media.neliti.com/media/publication/23505-ID-Perkawinan-sirri-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-hukum-positif.pdf

<http://Zhalabe.blogspot.com/2012/05/pengertian-nikah-sirri.html>.

<http://Iskandar-islam-indonesia.blogspot.com/2013/01/nikah-sirri-nikah-di->

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

Husnita, Dewi Nst, Sub Bagian Umum, wawancara pribadi.

Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Islami, Irfan, perkawinan di bawah tangan, Adil:Jurnal Hukum, Vol 8 No.1.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-6, Jakarta: Kencana, 2010.

Makalew, Jane Marien, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No 2 April-Juni 2013.

Maritadinda, Adisti Admar, Sub Bagian Penyusunan Program, wawancara pribadi,

MUNAS (Musyawarah Nasional) MUI, !!-17 Rajab 1400 H/ 1Juni 1980 M.

Naharin, Ni'matun, Fadilah Nur, perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dalam perspektif fesimis, *Jurnal Ahkam*, Vol 5, No 2 November 2017.

Prihatsanti, Unika dkk, menggunakan studi kasus sebagai metode ilmiah dalam psikologi, *Jurnal Buletin Psikologi* 2018 Volume 26 No 2.

Rais, Isnawati, Praktek Kawin Mjut'ah di Indonesia, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1.

Rofi'ah, Khusniati, Nikah Mut'ah Sebagai Al-Ternatif Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol 9 No. 1Juni 2012.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Saleh, Muhammad Ridwan, PERKAWINAN MUT'AH perspektif hukum islam dan hukum nasional. *Jurnal Al-Qadau* Volume 1 Nomor 1/2014.

Semuji, Perkawinan Perspektif hukum silam, *Jurnal Paradigma* Volume 2, Nomor 1, November 2015

Soekamto, Soerjuono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986.

Sonata, Depri Liber, metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode penelitian, *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No1, Januari-Maret 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DI*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suryansyah, Hotma Lubis, Staff/Administrator database.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranadamedia, 2006.

Tanjung, Vivi Lia Falini, Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Jurnal Resttuti, Volume 1 No 1, Januari-Juli 2019.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2016.

Uraidy, Ali, perkawinaan sirri dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nio. 01 tahun 1974, Jurnal Ilmiah fenomena, volume 2 2012.

Usman, Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03-September 2017.

Widawaty, Zuhma dkk, Pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak perkawinan bawah tangan (dari segi hukum) di desa kuala kecamatan blang mangat Kota Lhokseumawe, Jurnal Proccedding Seminar Nasional Politeknik, Vol 2 No 1 september 2018.

Zuhaili, Wahbah bin Musthafa, *Tafsir Al-munir fi Al- Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, ke-2 Damaskus: Dar Fiqr Al-Mu'ashir, 1418 H.

## **RIWAYAT HIDUP**

Sulhanuddin Lubis lahir di kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada 14 Juni 1995 , atau 15 Muharram 1416 H tepatnya dua puluh tiga tahun lalu. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Lokot Lubis dan Julianan Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN. 02 Kayu Jati Kecamatan Panyabungan pada tahun 2007/2008. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang tingkat pertama di MTs Musthafawiyah Purba Baru dan selesai pada tahun 2010/2011. Pada pendidikan tingkat atas, penulis menyelesaikan pendidikan di MA Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2013/2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Islam Sumatera Utara (UINSU) Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah dan selesai pada tahun 2019. Semasa berkuliah, penulis aktif berorganisasi baik intra kampus maupun extra kampus.

## **CURRICULUM VITAE**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulhanuddin Lubis

Umur : 24 tahun

Tanggal lahir : 14 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kota  
Kabupaten Mandailing Natal

### **Pendidikan**

1. Tamatan SD Negeri 02 Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2008
2. Tamatan Madrasah Tsanawiyah Musthafawiyah Kecamatan Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2011
3. Tamatan Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Musthafawiyah Kecamatan Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2014
4. Pernah memasuki Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara sampai tingkat persiapan sarjana.

### **Kegiatan Kemahasiswaan**

Pernah menjadi anggota dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Koordinator Kajian dan Penelitian Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Perguruan Merpati Putih Se-Kawasan UINSU. Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 15 November 2019

Sulhanuddin Lubis

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Apakah harus isbat nikah bagi pasangan yang perkawinanya di bawah tangan dalam mengurus akta ?
2. Bagaimana Proses permohonan akta kelahiran anak bagi pasangan yang tidak menikah di hadapan pegawai pencatatat nikah ?
3. Apakah ada biaya dalam pengurusan akta lahir ?
4. Bagaimana proses permohonan akta bagi orang tua yang mengangkat anak yang tidak diketahui asal usulnya ?
5. Apa-apa saja berkas tambahan yang dilampirkan bagi orang yang kawin siri ?
6. Apa yang membedakan anak perkawinan sah dan kawin siri di dalam akta kelahiran.
7. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam prosedur pembuatan akta kelahiran ?
8. Apakah akibat hukum terhadap anak di bawah tangan setelah mendapat akta kelahiran ?